



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Karanganyar

Halaman 21

Bantuan Pendidikan Daerah Cair

■ Dana dari Pemprov Belum Jelas

KARANGANYAR - Pengelola

sekolah-sekolah terutama SMA dan SMK mengeluhkan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan dari daerah ke Pemprov Jateng.

Sebab, sampai saat ini bantuan operasional pendidikan yang dijanjikan belum jelas besaran dan kapan pencairannya.

"Justru yang bantuan dari pemerintah daerah sudah cair mulai Kamis (3/8) lalu. Kami sudah mencairkannya ke rekening sekolah agar bisa dipergunakan untuk operasional, karena semua menggeluh tidak punya anggaran operasional," kata Sekretaris Dinas Dikbud Karanganyar Agus

Karyanto, Jumat (4/8).

Kepada *Suara Merdeka* usai shalat Jumat, dia mengatakan, dana subsidi Pemkab Karanganyar Rp 500.000 untuk siswa SMA dan Rp 700.000 untuk siswa SMK sudah mulai dicairkan dan diterima oleh sekolah.

Total dana yang disediakan melalui APBD 2017 ini mencapai Rp 18 miliar. Namun jumlah itu masih kurang, karena kebutuhan totalnya lebih dari Rp 20 miliar.

Sisanya akan dianggarkan di APBD-Perubahan yang akan mulai dibahas pada bulan ini.

"Kami sudah menganggarkan untuk menggenapi sisanya dan diharapkan persoalan subsidi operasional pendidikan sudah tidak ada masalah lagi. Sebab, dananya ada dan sudah cair, tinggal sekolah membuat kebijakan berkaitan operasional siswa," kata dia.

Namun, saat ini yang belum jelas adalah pemberian dana operasional sekolah yang dijanjikan Pemprov Jateng. Sebab, dulu Pemprov Jateng berjanji akan memberikan dana operasional kepada siswa Rp 125.000 per siswa SMA pertahun, dan Rp 140.000 untuk siswa SMK.

"Namun ternyata dana bantuan operasional dari provinsi itu belum dicairkan. Bahkan, besarnya juga masih akan dibicarakan lagi. Karena itu, sejak

awal tahun lalu, seluruh pengelola SMA dan SMK terus menerus mengeluh karena dana yang bisa digunakan hanya dana BOS pusat Rp 1,4 juta per siswa itu pun cair sekitar saat ujian nasional sudah dilaksanakan."

Lapor ke Dinas

Saat ini Dinas Dikbud Karanganyar yang ikut menggugat soal pengalihan kewenangan melalui Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten), karena menghilangkan kebijakan pendidikan gratis sampai SLTA yang dijadikan program pimpinan daerah, akan melaporkan saja soal SMA dan SMK itu. "Kami akan melaporkan ke Dinas Dikbud Provinsi, daerah memberikan subsidi Rp 500.000 dan Rp 700.000. Kemudian masih ada sisa untuk operasional setelah dana BOS pusat. Tinggal Pemprov Jateng akan *nomboki* berapa," paparnya.

Menurut dia, jika bantuan dana Pemprov bisa minimal sama dengan daerah, maka pendidikan gratis akan bisa terus berlangsung.

"Tetapi kalau hanya seperti rencana awal tahu Rp 125.000 dan Rp 140.000 per siswa, maka sekolah dipastikan akan memungut SPP dari orang tua."

Sekolah yang sudah pasti adalah SMA 2 Karanganyar yang mematok Rp 120.000 per siswa. Namun kemudian akan dikoreksi, karena besaran dana bantuan daerah sudah jelas. Sebab, angka itu muncul jika dana dari kabupaten tidak ada. Kemudian SMA 1 Karanganyar dan SMK 1 serta SMK 2 yang juga sudah mengadakan pertemuan awal Komite Sekolah, akan segera menentukan besarnya SPP yang dipungut dari orang tua siswa. Dana itu nantinya akan digunakan sebagai tambahan operasional sekolah. (an-41)